

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Koperasi

Koperasi menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 1 Ayat (1) tentang perkoperasian, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi - rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Menurut UUD 1945 mengaakan bahwa koperasi adalah gerakan ekonomi rakyat yang dijalankan berdasarkan asas kekeluargaan. Kerjasama merupakan inti dari adanya sebuah koperasi, yaitu sebuah kerjasama yang terjalin antar anggotanya demi terwujudnya sebuah kesejahteraan anggota masyarakat dan membangun sebuah tatanan perekonomian nasional. Koperasi tidak hanya milik rakyat kelas bawah, tetapi juga milik rakyat kelas menengah maupun kelas atas, karena koperasi milik seluruh rakyat indonesia.

Ada beberapa landasan koperasi Indonesia yang melandasi aktifitas koperasi di Indonesia, yaitu:

- Landasan Idiil (Pancasila)
- Landasan Mental (Setia kawan & kesadaran diri sendiri)
- Landasan Struktural & Gerak (UUD 1945 Pasal 33 Ayat 1)

2.1.2 Landasan, Fungsi, Peran dan Tujuan Koperasi

Landasan koperasi terdiri atas landasan ideal koperasi adalah Pancasila yaitu sila keempat. Landasan Struktural Koperasi Indonesia adalah UUD 1945 dan landasan gerakannya Pasal 33

Ayat 1 UUD 1945 beserta penjelasannya. Sedangkan mental dari Koperasi Indonesia adalah setia kawan dan kesadaran pribadi. Menurut Undang – Undang nomor 25 tahun 1992, Pasal 4, Peran dan Fungsi Koperasi adalah :

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Tujuan koperasi menurut UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 3, “Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur berlandaskan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945”.

2.1.3 Prinsip – Prinsip dan Asas Koperasian

Prinsip koperasi merupakan aturan – aturan pokok yang berlaku dalam koperasi dan dijadikan sebagai pedoman koperasi. Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, prinsip koperasi sebagai berikut :

- 1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
- 2) Pengelolaan dilakukan secara demokratis
- 3) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha setiap anggota

Asas koperasi menurut pasal 2 Undang – Undang Perkoperasian mengatakan “Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 atas asas kekeluargaan”.Koperasi berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan sesuai dengan

kepribadian bangsa. Usaha yang dijalankan koperasi menjadi tanggungjawab bersama, dan keuntungan maupun kerugian ditanggung bersama”.

2.1.4 Jenis – Jenis Koperasi

Menurut Pasal 16 Undang – Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian yang mana menyebutkan bahwa jenis koperasi terdiri sebagai berikut :

1. Koperasi yang beranggotakan masyarakat baik selaku konsumen maupun produsen barang. Menyelenggarakan fungsi penghimpun dana dan meyediaan pinjaman untuk kegiatan anggota, baik selaku konsumen maupun produsen. Koperasi ini dapat disebut sebagai koperasi jasa.
2. Koperasi konsumen
Koperasi yang anggotanya para konsumen atau pengguna barang kebutuhan sehari – hari. Usaha koperasi jenis ini menyelenggarakan fungsi penyedia barang – barang keperluan sehari – hari untuk kepentingan anggota dan masyarakat selaku konsumen.
3. Koperasi produsen
Koperasi yang beranggotakan para produsen barang dan memiliki usaha rumah tangga. Koperasi jenis ini menyelenggarakan fungsi penyedia bahan atau sarana produksi, pemrosesan dan pemasaran barang yang dihasilkan anggota selaku produsen.
4. Koperasi pemasaran
Koperasi yang beranggotakan para pemasok barang hasil produksi. Koperasi jenis ini menyelenggarakan fungsi pemasaran atau distribusi barang yang dihasilkan atau diproduksi oleh anggota.
5. Koperasi jasa
Koperasi yang menyelenggarakan fungsi pelayanan jasa tertentu untuk kepentingan anggota, misalnya, jasa angkutan, audit, pendidikan, asuransi, dan sebagainya.

2.1.5 Pengertian Akuntansi

Akuntansi merupakan peranan penting dalam entitas karena akuntansi menghasilkan informasi yang menjelaskan kinerja

keuangan entitas dalam suatu periode tertentu dan kondisi keuangan entitas pada tanggal tertentu. Secara umum, akuntansi dapat diartikan sebagai sistem informasi yang menyediakan laporan keuangan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan.

Menurut Sadeli (2015:2), Akuntansi adalah suatu kegiatan mencatat, meringkas, melaporkan, menginterpretasikan data dasar ekonomi untuk kepentingan perorangan, pengusaha, pemerintah, dan anggota masyarakat.

2.1.6 Pengertian Piutang

Di masa yang sekarang transaksi penjualan banyak dilakukan oleh perusahaan secara kredit, dilakukan penyerahan barang di awal atau barang jasa telah sampai kepada pembeli. Dalam jangka waktu tersebut maka timbulah piutang dimana ada nya tagihan yang harus di bayarkan di kemudian hari sesuai dengan kesepakatan awal. Tagihan tersebut tidak hanya dari penjualan secara kredit tetapi dapat timbul dari kegiatan yang lain, seperti pemberian jaminan kepada karyawan, meminjamkan uang atau barang kepada debitur. Piutang merupakan salah satu unsur dari aktiva lancar dalam neraca perusahaan yang timbul akibat adanya penjualan barang, jasa atau pemberian kredit terhadap debitur yang pembayaran pada umumnya diberikan dalam tempo 30 hari sampai dengan 90 hari. Dalam arti luas, piutang merupakan tuntutan terhadap pihak lain yang berupa uang, barang atau jasa yang dijual secara kredit. Piutang dalam akuntansi lebih sempit pengertiannya yaitu untuk menunjukkan tuntutan pada pihak luar perusahaan yang diharapkan akan diselesaikan dengan penerimaan sejumlah uang tunai.

Piutang menurut SAK ETAP paragraph 4.2 dan 4.4, piutang merupakan hak tagih sebagai akibat penyerahan barang atau jasa dimasa lalu. Piutang terdiri dari piutang usaha dan piutang non usaha. Menurut Mardiasmo (2016:15), "Piutang adalah tagihan yang timbul dari penjualan barang dagang dan jasa secara kredit". Menurut Rizal Effendi (2015:205), Piutang diartikan sebagai aset perusahaan yang ada pada pihak lain akibat adanya transaksi

penjualan barang atau jasa atau transaksi lainnya pada masa lalu, yang akan diterima pada masa yang akan datang”.

2.1.7 Piutang Koperasi

Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 04/Per/M.KUMKM/VII/2012 Tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi, piutang terbagi dari 4 jenis sebagai berikut :

- 1) Piutang Usaha
Tagihan koperasi yang terjadi akibat transaksi pemberian pinjaman atau penyerahan barang kepada pihak lain secara kredit.
- 2) Piutang pinjaman anggota
Tagihan koperasi yang terjadi akibat transaksi pemberian pinjaman secara kredit kepada anggota koperasi.
- 3) Piutang Pinjaman Non Anggota
Tagihan koperasi yang terjadi akibat transaksi pemberian pinjaman secara kredit kepada non anggota koperasi.
- 4) Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Penyisihan terhadap nilai tertentu sebagai pengurangan nilai nominal piutang pinjaman atas terjadinya kemungkinan resiko piutang tak tertagih, yang dibentuk untuk menutup kemungkinan kerugian akibat pemberian piutang pinjaman.

2.1.8 Klasifikasi Piutang

Piutang menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK), piutang merupakan pelepasan aset tetap yang diakui pada saat awal sebesar nilai wajarnya. Jika pembayaran untuk hal tersebut ditangguhkan, perhitungan yang akan diterima diakui pada saat awal sebesar nilai tunainya.

Penggolongan piutang menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yaitu menurut sumber terjadinya, ialah piutang usaha dan piutang lain- lain. Piutang dapat diklasifikasikan menurut beberapa cara yaitu :

1. Piutang Usaha (Trade Receivable)
2. Piutang Non Usaha (Non – Trade Receivable)

3. Piutang yang bersifat lancar atau jangka pendek dan piutang tidak lancar atau jangka panjang.

Menurut Kieso, (2014:299), piutang diklasifikasikan sebagai piutang lancar atau piutang jangka pendek dan piutang tidak lancar atau piutang jangka panjang, piutang lancar diharapkan dapat di tagih dalam waktu satu tahun selama siklus operasi berjalan. Piutang usaha biasanya dapat ditagih dalam jangka waktu 30 hari sampai 60 hari dan merupakan akun terbuka yang berasal dari pelunasan kredit jangka pendek.

Beberapa macam piutang diantaranya :

1. Piutang Usaha (Trade Receivable)
Transaksi paling umum yang menghasilkan piutang adalah penjualan barang atau jasa secara kredit. Piutang di catat sebagai debit pada akun piutang usaha. Piutang tersebut diharapkan dapat ditagih dalam waktu 30 hari sampai 60 hari. Piutang tersebut digolongkan sebagai aset lancar di laporan posisi keuangan. (Reeve dkk, 2012:437)
2. Wesel Tagih (Notes Receivable)
Wesel tagih merupakan janji tertulis dan formal. Selama diharapkan dapat ditagih dalam waktu setahun, wesel tagih dapat digolongkan sebagai aset lancar di neraca. Wesel tagih sering digunakan untuk periode kredit lebih dari 60 hari. (Reeve dkk, 2012:438)
3. Piutang Lain – Lain
Piutang lain – lain biasanya dikelompokkan secara terpisah di laporan posisi keuangan. Jika piutang tersebut dapat di tagih dalam waktu satu tahun maka diklasifikasikan sebagai aset lancar, sedangkan jika dapat ditagih lebih dari satu tahun maka diklasifikasikan sebagai aset tidak dilaporkan dibawah pos investasi.

Menurut Stice, Stice dan Skousen (2004:217) menyatakan bahwa piutang juga dapat di klarifikasikan berdasarkan lamanya jatuh tempo, di klasifikasikan dalam neraca yang terdiri dari :

1. Piutang Lancar

Yang termasuk kedalam piutang lancar atau jangka pendek adalah semua piutang yang diidentifikasi dapat di tagih dalam jangka waktu satu tahun atau dalam satu siklus operasi normal perusahaan. Untuk tujuan klasifikasi, umumnya piutang usaha dianggap sebagai piutang lancar dan termasuk ke dalam kategori aktiva lancar di dalam neraca.

2. Piutang Tidak Lancar

Yang termasuk ke dalam piutang tak lancar atau jangka panjang adalah semua piutang yang diklasifikasikan tidak dapat tertagih dalam jangka waktu satu tahun atau satu siklus operasi normal perusahaan. Tidak setiap pos piutang non usaha dianggap sebagai piutang tak lancar, karna perlu dianalisis secara terpisah guna menentukan apakah piutang tersebut layak untuk diasumsikan sebagai piutang tak lancar atau tidak.

2.1.9 Penggolongan Piutang Dalam Koperasi

Terdapat banyak jenis piutang pada koperasi, menurut Rudianto (2010:145), piutang dalam koperasi dapat di golongkan menjadi 3 kelompok berdasarkan jenis dan asalnya :

1. Piutang anggota

Piutang anggotamerupakan piutang yang timbul dari penjualan barang atau jasa yang dihasilkan koperasi kepada anggota koperasi. Pada kegiatan normal koperasi, piutang anggota biasanya akan dilunasi dalam tempo kurang dari satu tahun, sehingga piutang anggota dikelompokkan ke dalam aktiva lancar.

2. Piutang Bukan Anggota

Piutang bukan anggota merupakan piutang yang timbul akibat koperasi melakukan transaksi kredit kepada bukan anggota koperasi. Pada piutang ini mencakup piutang usaha dan piutang bukan usaha. Piutang usaha adalah piutang yang timbul dari transaksi penjualan produk koperasi. Sementara piutang bukan usaha adalah piutang yang timbul bukan dari aktivitas usaha koperasi. Termasuk dalam kedua kelompok ini adalah :

- Persekot dalam kontrak pembelian
- Klaim terhadap perusahaan angkutan atas barang yang rusak atau hilang

- Klaim terhadap perusahaan asuransi atas kerugian yang dipertanggungjawabkan
- Klain terhadap karyawan koperasi
- Klaim terhadap restitusi pajak
- Piutang dagang

3. Piutang karyawan

Piutang karyawan adalah tagihan koperasi kepada karyawan koperasi. Pembayaran piutang karyawan dilakukan melalui pemotongan gaji pada bulan berikutnya.

2.1.10 Pengakuan Piutang

Dalam banyak transaksi yang terjadi jumlah piutang yang akan diakui tergantung dari harga pertukaran diantara kedua belah pihak. Harga pertukaran tersebut adalah besarnya hutang dari yang berhutang (pelanggan atau peminjam) dan hal tersebut akan didukung oleh bukti atau faktur atas transaksi tersebut. (Fitri Nuraini & Andrianto, 2020 : 75)

Ayat jurnal untuk mengakui piutang atas penjualan barang atau jasa adalah :

Tgl	Keterangan	Ref	Debit	Kredit
	Piutang Usaha		xxx	
	Penjualan Barang / Jasa			xxx

Menurut SAK ETAP (2016), “Pengakuan Piutang apabila mempunyai usaha atau manfaat yang berupa segiekonomi yang diterima oleh perusahaan dimasa yang akan datang dan memiliki jumlah yang dapat diukur secara kredibel.”

2.1.11 Penilaian dan Pengukuran Piutang

Menurut (SAK ETAP 2015:42), Penilaian piutang harus disajikan dalam laporan keuangan dengan nilai tunai yang dapat direalisasi khusus untuk piutang usaha dan piutang – piutang yang mempunyai kemungkinan tidak tertagih hendaknya dibuatkan penyisihan dalam jurnal yang layak. Untuk menentukan besarnya

penyisihan pada tiap akhir tahun pengelompokkan piutang menurut umurnya (*aging schedule*) harus dibuat terlebih dahulu sebagai dasar perhitungan.

Besarnya penyisihan piutang sebagai berikut :

1. Di atas 3 bulan s/d 6 bulan besarnya penyisihan piutang adalah 30%
2. Di atas 6 bulan s/d 12 bulan besarnya penyisihan piutang adalah 50%
3. Di atas 1 tahun s/d 2 tahun besarnya penyisihan adalah 75% diajukan ke badan pengawas untuk dihapus.
4. Di atas 2 tahun besarnya penyisihan adalah 100% dan dikeluarkan dari pembukuan, tetapi masih tercatat secara extra comptable.

Pengukuran menurut SAK ETAP (2016), pengukuran piutang merupakan proses penetapan jumlah nominal yang digunakan entitas untuk mengukur kewajiban, pendapatan, aset, dan beban atau biaya ada dilaporan keuangan.”

2.1.12 Pencatatan Piutang

A. Prosedur Pencatatan Piutang

Dalam prosedur pencatatan piutang, yang bertujuan untuk mencatat mutasi piutang perusahaan kepada setiap debitur. Mutasi piutang adalah disebabkan oleh transaksi penjualan kredit, penerimaan kas dari debitur, retur penjualan, dan penghapusan piutang. Dalam prosedur ini fungsi akuntansi mencatat rangkap faktur penjualan kredit ke dalam kartu piutang.

Dokumen yang digunakan sebagai input pencatatan piutang adalah faktur (*invoice*). Pada prosedur dibagian terdahulu telah dijelaskan bahwa bagian piutang memperoleh faktur di bagian penagihan. Faktur – faktur tersebut dicatat ke dalam kartu piutang yang berperan sebagai buku pembantu (*subsidiary ledger*). Dalam hal ini posisi jurnal tidak terlihat, namun dalam pelaksanaannya jurnal dikerjakan oleh seorang petugas khusus. Hubungannya antara dokumen (*faktur*), jurnal, kartu piutang, dan surat pernyataan (*statement*) dalam proses

pencatatan piutang akan tergantung pada metode yang digunakan (Nugroho, 2001:331).

Menurut Martani, (2015), Dokumen pokok yang di gunakan sebagai dasar pencatatan ke dalam kartu piutang adalah :

1. Faktur Penjualan

Dalam neraca piutang, dokumen tersebut digunakan sebagai dasar pencatatan timbulnya transaksi piutang dari transaksi penjualan kredit. Dokumen tersebut dilampirkan dengan surat muat dan surat order pengiriman sebagai dokumen pendukung untuk mencatat transaksi penjualan kredit.

2. Bukti kas keluar

Dalam pencatatan piutang, dokumen tersebut digunakan sebagai dasar pencatatan berkurangnya piutang dari transaksi pelunasan oleh debitur.

3. Memo kredit

Dalam pencatatan piutang, dokumen tersebut digunakan sebagai dasar pencatatan retur penjualan. Dokumen ini dikeluarkan oleh bagian order penjualan, dan jika dilampiri dengan laporan penerimaan barang yang dibuat oleh bagian penerimaan barang, merupakan dokumen sumber untuk mencatat transaksi retur penjualan.

4. Bukti memorial

Bukti memorial merupakan sumber untuk dasar pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum. Dokumen ini digunakan sebagai dasar pencatatan penghapusan piutang.

B. Metode Pencatatan Piutang

Pada prakteknya tidak semua piutang dapat di tagih, akan ada hal hal yang tidak terduga sehingga para peminjam tidak dapat membayar. Sehingga akan terjadi kerugian piutang dan beban yang harus ditanggung. Dengan adanya hal tersebut maka akan di perlukan melakukan penghapusan piutang.

Penghapusan piutang adalah sebuah kerugian yang timbul karena adanya piutang tak tertagih oleh perusahaan. Piutang tak tertagih terjadi karena adanya perjanjian yang kurang terjamin pelunasannya. Faktor dari penyebabnya terjadinya piutang tidak tertagih karena kurangnya kontrol dari pemberi piutang, kurangnya usaha penagihan, kurangnya seleksi dalam pemberian piutang. Penyebab dari hal tersebut bisa terjadi dengan bermacam – macam keadaan diantaranya, terjadinya kebangkrutan usaha, kesulitan dalam keuangan sehingga tidak dapat melakukan pembayaran. Untuk menentukan sejumlah piutang usaha sebagai piutang tak tertagih adalah jika piutang tersebut sudah jauh melewati tanggal jatuh tempo dan segala upaya penagihan sudah dilakukan tetapi tidak bisa tertagih atau jika peminjam benar-benar sudah tidak mampu membayar utangnya atau perusahaan tersebut memiliki piutang di perusahaan lain tetapi perusahaan lain juga belum bisa membayar piutangnya sehingga perusahaan tersebut menunggu piutangnya dibayar oleh pihak lain, dan jika piutangnya dibayar oleh pihak lain maka perusahaan tersebut akan membayar piutangnya kepada perusahaan yang bersangkutan.

Menurut Rizal Effendi (2012:207) metode pencatatan piutang dibagi menjadi dua sebagai berikut :

a) Metode Cadangan / Penyisihan

Metode yang digunakan apabila kerugian piutang yang biasa terjadi, cukup besar jumlahnya. Tiga hal penting yang perlu diperhatikan dalam penerapan metode ini sebagai berikut :

- Kerugian piutang tak tertagih ditentukan jumlahnya melalui taksiran dan ditandingkan dengan penjualan pada akhir periode akuntansi yang sama dengan periode terjadinya penjualan.
- Jumlah piutang yang ditaksir tidak akan dapat diterima dicatat dengan mendebet rekening kerugian piutang dan mengkredit rekening cadangan kerugian piutang.

- Kerugian piutang yang sesungguhnya terjadi dicatat dengan mendebet rekening cadangan kerugian piutang dan mengkredit rekening piutang dagang pada saat suatu piutang dihapus dari pembukuan.

1. Pencatatan transaksi kerugian piutang

Untuk memberikan gambaran mengenai penerapan metode cadangan / penyisihan, di misalkan suatu Perusahaan Mitra Sentosa pada 2011 melaksanakan penjualan kredit sebesar Rp 150.000.000,- . Dari jumlah tersebut didapatkan piutang sebesar Rp 50.000.000,- yang belum dapat tertagih sampai dengan tutup buku pada tanggal 31 Desember 2011. Bagian kredit memperkirakan bahwa dari jumlah piutang tersebut, sebesar 10% (Rp 5.000.000,-) diantaranya tidak dapat di tagih.

Jurnal yang harus dibuat untuk mencatat taksiran kerugian piutang sebagai berikut :

	Beban/Kerugian Piutang Tak Tertagih		5.000.000	
	Cadangan/Penyisihan Piutang			5.000.000

2. Pencatatan Penghapusan Piutang

Perusahaan Mitra Sentosa pada tanggal 1 Mei 2012 memberikan persetujuan bahwa piutang pada perusahaan Jaya Makmur sebesar 800.000,- dihapus dari pembukuan karena tidak mungkin dapat diterima pelunasannya. Jurnal untuk mencatat penghapusan piutang tersebut sebagai berikut :

	Cadangan/Penyisihan piutang		800.000	
	Piutang Dagang			800.000

3. Penerimaan kembali piutang yang telah dihapus

Perusahaan Jaya Makmur melakukan pembayaran kewajibannya kepada perusahaan Mitra Sentosa pada tanggal 1 Juli 2012 (rekening piutang kepada

perusahaan Jaya Makmur telah dihapus dalam pembukuan Perusahaan Mitra Sentosa, maka jurnal harus dibuat oleh perusahaan Mitra Sentosa sebagai berikut :

	Piutang Dagang Cadangan/Penyisihan Piutang		800.000	800.000
--	---	--	---------	---------

	Kas Piutang Dagang		500.000	500.000
--	-----------------------	--	---------	---------

b) Metode Penghapusan Langsung

Apabila perusahaan menggunakan metode penghapusan langsung, maka jumlah kerugian piutang tidak perlu ditaksir dan dalam pembukuan tidak digunakan cadangan/penyisihan kerugian piutang. Apabila suatu piutang diyakini tidak akan dapat tertagih lagi, maka kerugian akibat piutang tersebut langsung didebetkan ke dalam rekening Kerugian Piutang dan rekening piutang Dagang dikredit. Dimisalkan, perusahaan Mitra Sentosa mempunyai piutang pada perusahaan Jaya Sentosa sebesar Rp 1.000.000,-. Pada tanggal 12 Desember 2011 kepala bagian kredit perusahaan Mitra Sentosa memutuskan untuk menghapus piutang kepada perusahaan Jaya Makmur karena sudah tidak mungkin ditagih. Apabila perusahaan Mitra Sentosa menggunakan metode penghapusan langsung, maka pada tanggal tersebut dibuat jurnal sebagai berikut :

	Beban/Kerugian Piutang Piutang Dagang		1.000.000	1.000.000
--	--	--	-----------	-----------

Contoh: pada tanggal 31 Desember 2010 dihitung taksiran kerugian piutang sebesar Rp 100.000.000,-. Pada tanggal 15 April 2011 langganan A yang piutang sebesar

Rp 15.000.000,- bangkrut dan menyatakan akan melunasi utangnya. Tetapi pada tanggal 1 Juli 2011 langganan A datang dan menyatakan akan melunasi utangnya pada tanggal 1 Agustus 2011. Jurnal yang dibuat untuk mencatat transaksi – transaksi di atas sebagai berikut :

Tabel 2.1 Perbedaan Saldo Metode Cadangan Dengan Penghapusan Langsung

Transaksi	Metode Cadangan	Metode Penghapusan Langsung
31-12-2010 Taksiran Kerugian Piutang Rp 100.000.000,-	Beban/Kerugian Piutang 100.000.000 Cadangan/Penyisihan Piutang 100.000.000	Tidak Ada Jurnal
15-4-2012 Menghapus piutang A sebesar Rp 15.000.000,-	Cadangan/Penyisihan Piutang 15.000.000 Piutang 15.000.000	Beban/Kerugian Piutang 15.000.000 Piutang 15.000.000
1-7-2011 Pernyataan dari A akan melunasi	Piutang 15.000.000 Cadangan/Penyisihan Piutang 15.000.000	Piutang 15.000.000 Beban/Kerugian Piutang 15.000.000
1-8-2011 Penerimaan uang dari piutang yang sudah dihapus	Kas 15.000.000 Piutang 15.000.000	Kas 15.000.000 Piutang 15.000.000

Apabila pernyataan dari langganan A dan pelunasan kembali terjadi pada tahun 2012, maka jurnal yang dibuat sebagai berikut :

Tabel 2.2 Ayat Jurnal Pelunasan Kembali Piutang

2012	Piutang 15.000.000	Piutang 15.000.000
------	--------------------	--------------------

Penyataan dari langganan A akan melunasi	Cadangan/Penyisihan Piutang 15.000.000	Penerimaan piutang yang sudah dihapus 15.000.000
2012 Penerimaan uang dari piutang yang sudah dihapus	Kas 15.000.000 Piutang 15.000.000	Kas 15.000.000 Piutang 15.000.000

2.1.13 Penyajian dan Pengungkapan Piutang

Menurut Martani, (2014:226), Didalam laporan posisi keuangan piutang disajikan dalam kelompok aset lancar. Nilai piutang dapat disajikan pada laporan posisi keuangan setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Laporan keuangan neraca, piutang disajikan dengan nilai tunai yang dapat direalisasikan. Jumlah perimaan kembali piutang yang sudah dihapuskan harus disajikan kembali dalam laporan laba rugi sebagai bagian dari pendapatan yang diluar operasi.

Sedangkan menurut SAK ETAP paragraf 3.1 mengatakan bahwa penyajian dan pengungkapan disajikan dan diungkap secara wajar yang mensyaratkan jujur atas pengaruh transaksi.

2.1.14 Kriteria SAK ETAP

Menurut SAK ETAP (2013:1), SAK ETAP dimaksudkan untuk: Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik, namun entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan dapat menggunakan SAK ETAP jika otoritas berwenang membuat regulasi yang mengizinkan penggunaan SAK ETAP.

Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik adalah entitas yang:

1. Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan
2. Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement) bagi pengguna eksternal. Contoh

penggunaan eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga permeringkat kredit.

Entitas memiliki akuntabilitas publik signifikan jika:

1. Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal; atau
2. Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana dan bank investasi.

2.1.15 Perbedaan SAK ETAP dan SAK Umum

Tabel 2.3
Perbedaan SAK ETAP dan SAK Umum

No.	Keterangan	SAK ETAP	SAK Umum
1.	Laporan Keuangan	a) Neraca b) Laporan Laba Rugi c) Laporan Perubahan Ekuitas d) Catatan Atas Laporan Keuangan	a) Laporan Posisi Keuangan b) Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain c) Laporan Perubahan Ekuitas d) Laporan Arus Kas e) Catatan Atas Laporan Keuangan
2.	Laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas	Dapat digantikan dengan laporan laba rugi dan saldo laba pada kondisi tertentu	Tidak ada alternatif lain untuk menyusun laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas
3.	Metode penyusunan arus kas dari kegiatan operasi	Metode tidak langsung	Metode langsung dan metode tidak langsung

4.	Keuntungan belum direalisasi dari kategori investasi tersedia untuk dijual	Disajikan di ekuitas	Disajikan sebagai penghasilan komprehensif lain
5.	Investasi pada asosiasi	Diukur menggunakan metode biaya	Diukur menggunakan metode ekuitas
6.	Investasi pada entitas anak	Diukur menggunakan metode ekuitas, tidak dikonsolidasi	Konsolidasi
7.	Aset tetap	Satu alternatif pengukuran menggunakan metode biaya perolehan. Revaluasi aset tetap dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah.	Alternatif metode pengukuran : a) Metode biaya perolehan b) Metode nilai wajar
8.	Properti investasi	Satu alternatif pengukuran menggunakan metode biaya perolehan	Alternatif metode pengukuran : a) Metode biaya perolehan b) Metode nilai wajar
9.	Aset tak berwujud	Satu alternatif pengukuran menggunakan metode biaya perolehan	Alternatif pengukuran metode : a) Metode biaya perolehan b) Metode nilai wajar
10.	Kriteria pengakuan sewa pembiayaan	Salah satu dari : a) Sewa mengalihkan kepemilikan aset kepada <i>lessee</i> di akhir masa sewa b) Lessee memiliki opsi beli pada harga yang cukup rendah dibandingkan meilai wajarnya c) Masa sewa adalah untuk sebagian besar	Kriteria bersifat <i>principle based</i> , jika telah terjadi transfer dan benefit dari lessor kepada <i>lessee</i> .

		<p>umur ekonomis aset yaitu sama atau lebih dari 75% umur ekonomis aset</p> <p>d) Pada awal masa sewa, nilai kini dari jumlah pembayaran sewa minimum secara substansial mendekati nilai wajar aset sewaan atau aset sama atau lebih dari 90% nilai wajar aset</p> <p>e) Aset sewaan bersifat khusus, dimana hanya <i>lesse</i> yang dapat menggunakan tanpa perlu modifikasi secara material</p>	
11.	Kapasitas biaya pinjaman	Tidak diperkenankan, semua dibebankan sebagai beban bunga	Diperkenankan
12.	Pajak penghasilan	Tidak mengakui pajak tangguhan	Mengakui pajak tangguhan

Sumber : diolah kembali berdasarkan Martani(430-431:2015) dan IAI www.iaiglobal.or.id di akses tanggal 1 Maret 2016 (Akuntansi Keuangan dalam Perspektif IFRS dan SAK-ETAP).

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang perlakuan akuntansi atas piutang menurut SAK ETAP sering dilakukan oleh peneliti – peneliti sebelum nya pada koperasi penelitian tersebut dapat banyak memberikan kontribusi kepada koperasi dalam menyajikan informasi laporan keuangan yang secara wajar dan sesuai dengan standart yang berlaku di indonesia. Berikut adalah penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini dan sebagai perbandingan untuk penelitian ini.

Tabel 2.4
Penelitian Terdahulu

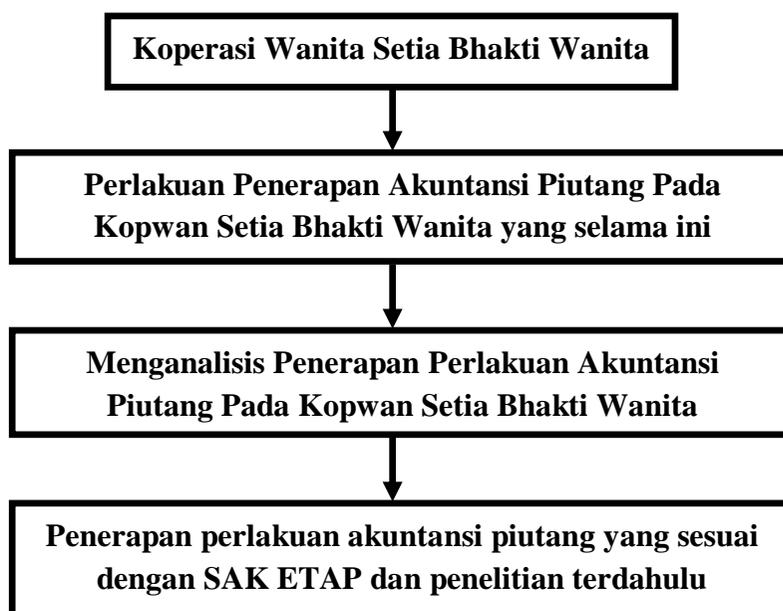
No	Nama Penulis	Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1.	Nora Haliza	2021	Analisis Akuntansi Piutang Pada PT. Sarana Hidrolik Angkasa	Perusahaan menggunakan metode penghapusan langsung, maka pada akhir periode akuntansi PT. Sarana Hidrolik Angkasa tidak terdapat akun penyisihan piutang tak tertagih, akibat tidak dilakukannya penaksiran terhadap piutang tak tertagih.
2.	Feriana Ningtyas Rosita	2019	Analisis Perlakuan Akuntansi Piutang Pada Koperasi Menurut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Pada Koperasi Wanita Kartika Jaya Kabupaten Tuban	Perlakuan piutang akuntansi piutang Koperasi Wanita Kartika Jaya sesuai dengan SAK ETAP yang berlaku, dengan pencatatan menggunakan metode akrual basis serta piutang dicatat pada saat terjadinya transaksi. Akan tetapi tidak melakukan cadangan kerugian piutang pada akhir periode atas piutang yang tak tertagih yang dapat berguna untuk memperkirakan piutang yang mungkin akan tidak tertagih.
3.	Ahmad Dlofirut Tamam	2020	Analisis Perlakuan Akuntansi Musyarakah Berdasarkan PSAK No. 106 Pada Koperasi Sunan Drajat	Pengungkapan laporan keuangan pembiayaan Musyarakah pada Koperasi Sunan Drajat sebagian besar belum sesuai dengan pengungkapan pembiayaan Musyarakah pada PSAK No. 106

			Lamongan	
--	--	--	----------	--

2.3 Kerangka Konseptual

Berdasarkan tujuan penelitian untuk memudahkan suatu penelitian maka diperlukan suatu kerangka yang menggambarkan suatu hubungan dari variabel analisis penerapan perlakuan akuntansi piutang berdasarkan SAK ETAP, maka dibuat kerangka penelitian sebagai berikut :

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



Sumber : Penulis